



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 26 TAHUN 1997**  
**TENTANG**  
**HUKUM DISIPLIN PRAJURIT**  
**ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam fungsinya sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan, dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan;

b. bahwa dalam rangka mengemban fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tetap konsisten dengan sikap dan tekadnya sebagai prajurit pejuang dan pejuang prajurit untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan serta melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sampah Prajurit;

c. bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai salah satu Modal Dasar Pembangunan Nasional perlu senantiasa ditingkatkan profesionalismenya melalui pemantapan disiplin, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia agar terwujud prajurit yang profesional efektif, efisien, dan modern sehingga mampu berperan lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai stabilisator dan dinamisator Pembangunan Nasional;

d. bahwa...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang saat ini masih diatur dalam Wetsboek van Krijgtucht voor Nederlands Indie (Staatsblad 1934 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan pertumbuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sehingga Undang-undang tersebut perlu dicabut dan diganti;
- e. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c, dan d perlu menetapkan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369).

Dengan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM DISIPLIN PRAJURIT  
ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
2. Hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna.

3. Tindakan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Tindakan disiplin adalah tindakan seketika yang dapat diambil oleh setiap atasan terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
4. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Atasan yang Berhak Menghukum terhadap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang atas dasar ketentuan Undang-undang ini melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
5. Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, berperan serta dalam pembangunan nasional, dan tunduk pada hukum militer.
6. Bawahan adalah setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang lain.
7. Atasan adalah setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang lain.
8. Atasan langsung adalah atasan yang mempunyai wewenang komando langsung terhadap bawahan yang bersangkutan.

9. Atasan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

9. Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disingkat Ankum adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-undang ini diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya.
10. Ankum Atasan adalah atasan langsung dari Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin.
11. Panglima adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

## Pasal 2

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku bagi:
  - a. prajurit;
  - b. mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk pada hukum yang berlaku bagi prajurit.
- (2) Ketentuan dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi prajurit yang sedang menjalani penahanan, pidana penjara, kurungan, dan tutupan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

**BAB II**  
**DISIPLIN PRAJURIT, PELANGGARAN HUKUMAN**  
**DISIPLIN PRAJURIT, TINDAKAN DISIPLIN**  
**DAN HUKUMAN DISIPLIN**

**Bagian Kesatu**  
**Disiplin Prajurit**

**Pasal 3**

- (1) Untuk menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berperilaku disiplin;
- (2) Disiplin prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan mematuhi semua peraturan dan norma yang berlaku bagi prajurit dan melaksanakan semua perintah kedinasan atau yang bersangkutan dengan kedinasan dengan tertib dan sempurna, kesungguhan, keikhlasan hati, dan gembira berdasarkan ketaatan serta rasa tanggung jawab kepada pimpinan dan kewajiban.

**Pasal 4**

- (1) Disiplin prajurit diatur dalam peraturan disiplin dan ketentuan-ketentuan tata tertib prajurit.
- (2) Peraturan disiplin dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Bagian...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

## Bagian Kedua

### Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit

#### Pasal 5

- (1) Pelanggaran hukum disiplin prajurit meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni.
- (2) Pelanggaran hukum disiplin murni merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.
- (3) Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.
- (4) Penentuan penyelesaian secara hukum disiplin prajurit tersebut pada ayat (3) merupakan kewenangan Perwira Penyerah Perkara yang selanjutnya disingkat Papera setelah menerima saran pendapat hukum dari Oditurat.

#### Pasal 6

- (1) Setiap prajurit yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit diambil tindakan disiplin dan/atau dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Setiap prajurit yang telah melakukan satu atau lebih pelanggaran hukum disiplin prajurit hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin.

Bagian...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

### Bagian Ketiga Tindakan Disiplin

#### Pasal 7

- (1) Setiap Atasan berwenang mengambil tindakan disiplin terhadap setiap bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit dan segera melaporkan kepada Ankum yang bersangkutan.
- (2) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan untuk menumbuhkan kesadaran dan mencegah terulangnya pelanggaran hukum disiplin prajurit.
- (3) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewenangan Ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

### Bagian Keempat Hukuman Disiplin

#### Pasal 8

Jenis hukuman disiplin prajurit terdiri dari:

- a. teguran;
- b. penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari;
- c. penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 9...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

### Pasal 9

- (1) Dalam hal-hal khusus, jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dan c dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Hal-hal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. negara dalam keadaan bahaya;
  - b. dalam kegiatan operasi militer;
  - c. dalam suatu kesatuan yang disiagakan;
  - d. seorang prajurit yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan.

## BAB III PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM DISIPLIN PRAJURIT

### Bagian Kesatu Atasan yang Berhak Menghukum

### Pasal 10

- (1) Ankum di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, secara berjenjang adalah sebagai berikut:
  - a. Ankum berwenang penuh;
  - b. Ankum berwenang terbatas;
  - c. Ankum berwenang sangat terbatas.

(2) Ketentuan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

#### Pasal 11

- (1) Ankum berwenang penuh mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya.
- (2) Ankum berwenang terbatas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dalam Pasal 8 kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya kecuali penahanan berat terhadap Perwira.
- (3) Ankum berwenang sangat terbatas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin teguran dan penahanan ringan kepada setiap Bintara dan Tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Ankum berwenang:
  - a. melakukan atau memerintahkan melakukan pemeriksaan terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya;
  - b. menjatuhkan hukuman disiplin terhadap setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya;
  - c. menunda pelaksanaan hukuman disiplin yang telah dijatuhkannya.
- (2) Ankum Atasan berwenang:
  - a. menunda...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. menunda pelaksanaan hukuman;
  - b. memeriksa dan memutus pangajuan keberatan;
  - c. mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya, agar kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang ini dilaksanakan secara adil, bijaksana, dan tepat.
- (3) Tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut oleh Panglima.

## Bagian Kedua

### Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit

#### Pasal 13

Penyelesaian pelanggaran hukum disiplin prajurit dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pemeriksaan;
- b. penjatuhan hukuman disiplin;
- c. pencatatan dalam buku Hukuman.

#### Pasal 14

Pemeriksaan dilakukan oleh:

- a. Ankum;
- b. Perwira atau Bintara yang mendapat perintah dari Ankum;  
atau
- c. Pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 15...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

#### Pasal 15

- (1) Pemeriksaan berwenang memanggil secara resmi seorang prajurit yang diduga melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit.
- (2) Prosedur pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.
- (3) Pemeriksaan berwenang meminta keterangan para saksi dan mengumpulkan alat-alat bukti lainnya.

#### Pasal 16

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara langsung tanpa paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan dan alat-alat bukti lainnya disatukan dalam Berkas Perkara Disiplin dan dilaporkan kepada Ankum.

#### Pasal 17

- (1) Ankum, setelah menerima Berkas Perkara Disiplin, wajib segera mengambil keputusan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Pengambilan keputusan oleh Ankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendengar pertimbangan Staf dan/atau Atasan langsung pelanggar serta dapat pula mendengar pelanggar yang bersangkutan.

(3) Ankum...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (3) Ankum tidak boleh menjatuhkan hukuman apabila tidak sepenuhnya yakin tentang dapat dihukumnya pelanggar atau apabila Ankum mengambil keputusan untuk tidak menjatuhkan hukuman. Selanjutnya, Ankum wajib membuat catatan dalam berkas perkara disiplin yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dijatuhi hukuman.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Ankum mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman disiplin, penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan dalam sidang disiplin.
- (2) Pada waktu menentukan jenis dan lamanya hukuman disiplin Ankum wajib mengusahakan terwujudnya keadilan di samping efek jera serta memperhatikan keadaan pada waktu pelanggaran itu dilakukan, kepribadian, serta tingkah laku pelanggar sehari-hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

#### Pasal 19

Keputusan hukuman disiplin dituangkan dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin.

#### Bagian Ketiga

##### Pelaksanaan Hukuman Disiplin Prajurit

#### Pasal 20

- (1) Hukuman Disiplin dilaksanakan segera setelah dijatuhkan oleh Ankum.

(2) Hari...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Hari penjatuhan hukuman berlaku sebagai hari pertama dari waktu hukuman yang ditentukan, kecuali jika pelaksanaan hukuman pada hari itu ditunda.
- (3) Waktu hukuman berakhir pada waktu apel pagi hari berikutnya dari hari terakhir hukuman yang harus dijalani.

#### Pasal 21

- (1) Hukuman Disiplin berupa penahanan untuk Perwira dilaksanakan di tempat kediaman, kapal, mes, markas, kemah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Ankum.
- (2) Hukuman Disiplin berupa penahanan untuk Bintara dan Tamtama dilaksanakan di bilik hukuman atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Ankum.

#### Pasal 22

Bagi terhukum disiplin yang sakit dan dirawat penahanan pelaksanaan hukumannya ditunda.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal pelaksanaan hukuman disiplin berupa penahanan ringan terhukum disiplin dapat dipekerjakan di luar tempat menjalani hukuman.
- (2) Dalam hal pelaksanaan hukuman disiplin berupa penahanan berat terhukum disiplin dapat dipekerjakan di luar tempat menjalani hukuman.

Pasal 24...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

#### Pasal 24

- (1) Hukuman disiplin dicatat dalam Buku Hukuman dan Buku Data Personel yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan hukuman disiplin diatur lebih lanjut oleh Panglima.

#### Bagian Keempat Pengajuan Keberatan

#### Pasal 25

- (1) Setiap prajurit yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan mengenai sebagian atau seluruh perumusan hukuman, jenis, dan/atau berat ringannya hukuman disiplin yang dijatuhkan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis, sopan, pantas dan diajukan secara hierarkis.
- (3) Dalam pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhukum dapat mengajukan satu atau dua orang perwira dalam kesatuannya untuk memberikan nasihat dengan persetujuan Ankum.

#### Pasal 26

- (1) Keberatan diajukan kepada Ankum Atasan melalui atasan langsungnya dalam tenggang waktu 4 (empat) hari setelah hukuman dijatuhkan.

(2) Setiap...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Setiap Atasan dan Ankum wajib menerima dan meneruskan pengajuan keberatan terhadap keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkannya kepada Ankum Atasan.
- (3) Keberatan terhadap hukuman disiplin yang telah diajukan tidak dapat ditarik kembali kecuali atas persetujuan Ankum Atasan.

#### Pasal 27

- (1) Ankum Atasan yang berwenang memutuskan keberatan wajib segera mengambil keputusan berupa menolak atau mengabulkan seluruh atau sebagian keberatan yang diajukan.
- (2) Dalam hal keberatan ditolak seluruhnya, Ankum Atasan menguatkan keputusan yang telah dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) Dalam hal keberatan diterima seluruhnya, Ankum Atasan membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (4) Dalam hal keberatan atau diterima sebagian, Ankum Atasan mengubah keputusan yang dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal terhukum disiplin tidak menerima keputusan terhadap keberatan yang diajukannya, yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan sekali lagi kepada Ankum Atasan dari Ankum yang telah memutus keberatan yang diajukan sebelumnya.

(2) Keberatan...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 2 (dua) hari terhitung setelah keputusan terhadap keberatan yang diajukan sebelumnya diberitahukan.
- (3) Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan (3) berlaku pula untuk Pasal ini.

#### Pasal 29

Keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Panglima merupakan keputusan terakhir.

#### Pasal 30

Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan hukuman disiplin yang akan atau sedang dijalankan, kecuali atas perintah Ankum atau Ankum Atasan.

### BAB IV

#### KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

#### Pasal 31.

Apabila Ankum menerima penyerahan berkas perkara dari Pengadilan dilingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan penyelesaiannya sebagai pelanggaran hukum disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Ankum menyelesaikan pelanggaran sesuai dengan hukum disiplin prajurit.

Pasal 32...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

### Pasal 32

- (1) Dalam hal seorang prajurit telah melakukan suatu tindak pidana yang menjadi kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer untuk memeriksa dan mengadilinya atau perkara itu telah diadilinya, maka terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh dijatuhi hukuman disiplin bersamaan dengan pidana yang akan atau sudah dijatuhkan.
- (2) Apabila hak penuntutan terhadap suatu pelanggaran yang hanya diancam pidana denda gugur karena pembayaran maksimum denda secara sukarela, maka terhadap pelaku tersebut tidak boleh dijatuhi hukuman didiplin.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin oleh Ankum tidak menghapuskan tuntutan pidana atau gugatan perkara-perkara lainnya.
- (4) Hak menjatuhkan hukuman disiplin gugur karena kadaluwarsa setelah 6 (enam) bulan terhitung :
  - a. sejak hari Ankum menerima laporan pelanggaran disiplin atau menerima berkas Berita Acara Pemeriksaan;
  - b. sejak hari Ankum menerima Surat Keputusan Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit dari Papera;
  - c. sejak hari Ankum menerima penyerahan berkas perkara dari Hakim pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer.

### Pasal 33

Menjalani hukuman disiplin berupa penahanan dianggap sebagai dinas.

Pasal 34...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

#### Pasal 34

- (1) Setiap Perwira yang mendapat cukup petunjuk untuk menyangka bahwa seorang bawahan telah bersalah melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit yang berat, berwenang melakukan atau memerintahkan penahanan sementara apabila dipandang perlu dan wajib segera melaporkan kepada Ankum yang membawahkan langsung pelanggar.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 x 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Bawahan tersebut wajib mematuhi penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 35

- (1) Seorang prajurit yang telah berulang-ulang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit dan/atau nyata-nyata tidak mempedulikan segala hukuman disiplin yang dijatuhkan sehingga dipandang tidak patut lagi dipertahankan sebagai prajurit, maka prajurit yang demikian diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 36

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berhubungan dengan disiplin prajurit yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Dengan berlakunya Undang-undang ini Wetboek van Krijgstucht voor Nederlands Indie (Staatsblad 1934 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1947 yang disebut Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT) dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undang tersendiri.

### Pasal 39

Undang-undang ini dapat juga disebut "Undang-undang Hukum Disiplin Prajurit".

Pasal 40...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

#### Pasal 40

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 1997  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 1997  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN**

**ATAS**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 26 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**HUKUM DISIPLIN PRAJURIT**

**ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA**

**UMUM**

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa dibesarkan dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Dengan demikian, Angkatan Bersenjata republik Indonesia mengemban fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik.

Prajurit Angkatan bersenjata Republik Indonesia yang ber-Sapta Marga dan ber-Sumpah Prajurit sebagai bhayangkari negara dan bangsa, dalam bidang pertahanan keamanan negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan negara, serta berbagai kader, pelopor, dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan dari manapun datangnya.

Dalam bidang sosial politik, bertindak selaku stabilisator dan dinamisator, bersama-sama dengan kekuatan sosial politik lainnya bertugas menyukseskan Pembangunan Nasional dalam rangka perjuangan bangsa mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah prajurit, setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memiliki sendi-sendi disiplin yang kukuh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamalan, serta sistem nilai dalam tata kehidupan yang mantap.

Disiplin prajurit pada hakekatnya merupakan:

- a. suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit;
- b. sikap...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa;
- c. ciri khas prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata.

Disiplin secara umum pada tingkat tertentu pada dasarnya memiliki sikap ketergantungan pada kuasa orang lain atau peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan alat kekuasaan untuk memaksakan ketaatan berupa peranti pengendalian sosial dalam tata kehidupan yang berwujud undang-undang disiplin. namun, pada tingkat biasa ketaatan tersebut telah tumbuh menjadi kesadaran.

Pada tingkat ini ketaatan yang dipaksakan itu telah ditransformasikan menjadi suatu tanggung jawab sosial.

Disiplin Prajurit mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang telah dipercayakan oleh bangsa dan negara kepadanya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap prajurit untuk menegakkan disiplin.

Upaya penegakan disiplin di dalam tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memerlukan suatu tatanan disiplin prajurit berupa Undang-undang tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Perwira, dalam upaya penegakan disiplin prajurit, memegang peranan penting dalam kepemimpinan Angkatan Bersenjata republik Indonesia, karena baik buruknya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ditentukan oleh kualitas Perwiranya.

Kepribadian Perwira harus dapat diwujudkan sebagai figur prajurit yang layak disebut "pemimpin kepajuritan paripurna". Setiap Perwira dituntut tanggung jawab lebih dari Bintara dan Tamtama dalam kehidupan keprajuritan, sehingga seorang Perwira diharapkan mempunyai kemampuan yang lebih besar, karena itu seorang Perwira diberi kepercayaan untuk membina disiplin khususnya yang berkedudukan sebagai Atasan yang Berhak Menghukum dengan kewenangan menghukum disiplin yang dikukuhkan dengan undang-undang.

Setiap...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Setiap Perwira, dalam fungsinya sebagai Atasan dalam tata kehidupan prajurit, harus berani mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya, dalam upaya menegakkan dan membina disiplin prajurit, karena itu setiap Atasan harus bertindak adil, tegas dan pasti, serta bijaksana untuk menyadarkan kembali bawahannya kepada kepribadian Prajurit

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1947 yang disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDHDT) terdapat ketentuan-ketentuan yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketentaraan dan perkembangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sehingga perlu diubah dan disempurnakan seperti mengenai dasar filosofis, politis, sosiologis, jenis hukuman pelaksanaan hukuman, dan pengajuan keberatan.

Dalam Undang-undang ini tidak dikenal lagi sebutan hukuman pokok dan hukuman tambahan.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 1

cukup jelas.

#### Angka 2

cukup jelas.

#### Angka 3

cukup jelas.

#### Angka 4

cukup jelas.

#### Angka 5

cukup jelas.

#### Angka 6

cukup jelas.

#### Angka 7

cukup jelas.

#### Angka 8

cukup jelas.

Angka 9...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Angka 9

cukup jelas.

Angka 10

cukup jelas.

Angka 11

cukup jelas.

## Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan mereka yang berdasarkan peraturan angsa tunduk pada hukum yang berlaku bagi prajurit antara lain:

- 1) Prajurit Siswa;
- 2) Militer Tituler;
- 3) Mobilisan pada waktu negara dalam keadaan bahaya.

Ayat (2)

Bagi prajurit yang sedang menjalani penahanan, pidana penjara, kurungan, dan tutupan, berlaku ketentuan tata tertib tempat menjalani penahanan atau tempat menjalani pidana, pembinaan disiplinnya diserahkan sementara dari Atasan atau Ankom kepada kepala Lembaga tempat menjalani pidana sampai masa penahanan atau masa pidananya selesai dijalani.

## Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 4

Ayat (1)

Peraturan disiplin dan ketentuan-ketentuan tata tertib prajurit tertuang dalam berbagai bentuk seperti keputusan, instruksi, surat keputusan, petunjuk, peraturan, dan surat telegram.

Contoh...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Contoh :

- a. Peraturan Penghormatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- b. Peraturan Baris Berbaris;
- c. Peraturan Dinas Garnisun;
- d. Peraturan Urusan Dinas Dalam;
- e. Tata Upacara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- f. Peraturan Seragam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sedemikian ringan sifatnya adalah:

- a. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. perkara sederhana dan mudah pembuktiannya; dan
- c. tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan/atau kepentingan umum.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan :

- a. Perwira Penyerah Perkara adalah Perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

b. Oditurat...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. Oditurat adalah Badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terdiri dari Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Oditurat Militer Pertempuran yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Jenis dan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan diserahkan penilaiannya kepada Ankum dalam rangka mencapai sasaran pembinaan.

#### Pasal 7

##### Ayat (1)

Atasan adalah setiap prajurit yang karena pangkat dan/ atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada prajurit yang lain.

Yang dimaksud dengan karena pangkatnya berkedudukan lebih tinggi:

- a. dalam hal pangkatnya sama, maka kedudukannya ditinjau dari lamanya menyandang pangkat;
- b. dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, maka kedudukannya ditinjau dari lamanya memangku jabatan setingkat;
- c. dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, lamanya memangku jabatan setingkat sama, maka kedudukannya ditinjau dari lamanya menjadi prajurit;
- d. dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, lamanya memangku jabatan setingkat sama, lamanya menjadi prajurit sama, maka kedudukannya ditinjau dari usianya.

Yang dimaksud dengan karena jabatannya berkedudukan lebih tinggi adalah jabatan yang sesuai dengan tingkat jabatan berdasarkan struktur organisasi atau berdasarkan penunjukan lebih tinggi dari pada yang lain.

Tindakan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Tindakan disiplin pada prinsipnya merupakan tindakan yang bersifat mendidik, meliputi teguran sebagai celaan dan/atau tindakan fisik yang tidak membahayakan kesehatan.

Ayat (2)

Tindakan fisik, antara lain, push up dan lari keliling lapangan.

Pelanggaran hukum disiplin yang dapat diselesaikan dengan tindakan disiplin, antara lain, terlambat apel, rambut gondrong, dan pakaian kotor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan negara dalam keadaan bahaya adalah keadaan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Keadaan Bahaya yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan operasi militer adalah pelaksanaan tugas pokok satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia baik strategis maupun teknis, pelayanan, latihan, dan administratif.

Termasuk dalam pengertian kegiatan operasi militer adalah pelaksana tugas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sesuai dengan rencana operasi.

Contoh :

- 1) Awak kapal perang yang sedang berlayar;
- 2) Awak pesawat terbang perang yang sedang di luar pangkalan;
- 3) Operasi...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- 3) Operasi khusus yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

#### Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk hal-hal yang akan diatur oleh Panglima antara lain prajurit Bawah Kendali Operasi (BKO), Bawah Perintah (BP) Bantuan Umum (BU), dan Karyawan ABRI.

#### Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud wewenang komando adalah wewenang memberi perintah baik dipasukan maupun di staf.

Wewenang komando diberikan kepada seorang Perwira untuk memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan satuan

Wewenang komando meliputi Komando Operasi dan/atau Komando Pembinaan.

Ayat (2)

Dalam hal Ankum berwenang terbatas akan menjatahkan hukuman disiplin penahanan berat terhadap Perwira yang berada di bawah wewenang Komandonya, maka diajukan kepada Ankum Atasan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Penundaan pelaksanaan hukuman didasarkan pada kepentingan dinas atau kepentingan prajurit yang bersangkutan.

Ayat (2)

Dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan memutus pengajuan keberatan, termasuk pula membuat pertimbangan dan menentukan jenis hukumannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 13

Huruf a

Untuk kepentingan pemeriksaan, apabila dipandang perlu dapat dilakukan penahanan dengan ketentuan tidak melebihi ancaman hukuman.

Huruf b

Penjatuhan hukuman disiplin termasuk pula kegiatan persidangan sampai dengan pelaksanaan hukuman.

Huruf c

Yang dicatat dalam Buku Hukuman, antara lain :

- 1) nomor dan tanggal Surat Keputusan penjatuhan hukuman;
- 2) jenis hukuman yang dijatuhkan.
- 3) ada tidaknya pengajuan keberatan.
- 4) keputusan terhadap pengajuan keberatan.

## Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Yang dimaksud dengan pejabat lain yang berwenang untuk itu adalah Provos Angkatan dan/atau Provos Polri.

Pasal 15...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

#### Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan meminta keterangan adalah meminta keterangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

Ayat (1)

Dalam mendapatkan keterangan pemeriksaan tidak boleh menggunakan paksaan.

Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran hukum disiplin prajurit harus ditandatangani oleh pemeriksaan dan yang diperiksa.

Ayat (2)

Berkas Perkara Disiplin berisi Berita Acara Pemeriksaan disiplin dan dokumen lain yang berhubungan dengan itu

#### Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan segera dalam ayat ini adalah waktu yang wajar yang memungkinkan Anjum mengambil keputusan tanpa menghalangi pelaksanaan tugas pokoknya, dan tidak menunda nunda pengambilan Keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 19

Setiap penjatuhan hukuman disiplin baik teguran maupun penahanan harus tertulis, hal ini dimaksudkan sebagai bukti hukuman dan sebagai dasar pencatatan dalam Buku Hukuman dan Buku Data Personel.

#### Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 21

Penemuan tempat penahanan disesuaikan dengan berat ringannya hukuman disiplin yang dijatuhkan.

#### Pasal 22

Cukup jelas.

#### Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

#### Pasal 24

##### Ayat (1)

Catatan hukuman disiplin menjadi salah satu bahan pertimbangan pembinaan prajurit yang bersangkutan.

##### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 25

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin memberitahukan kepada terhukum tentang haknya menggunakan penasehat dalam mengajukan keberatan dalam keputusan penjatuhan hukuman disiplin tersebut.

Dalam hal di kesatuan tidak ada Perwira, dapat ditunjuk prajurit lainnya.

#### Pasal 26

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 27

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan segera pada ayat ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 17 ayat (1).

##### Ayat (2)

Penolakan dituangkan dalam Surat Keputusan.

Ayat (3)...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat (3)

Pembatalan dituangkan dalam Surat Keputusan.

Ayat (4)

Perubahan tentang perumusan alasan, jenis dan/atau berat ringannya hukuman disiplin dituangkan dalam Surat Keputusan, selanjutnya dicatat dalam Buku Hukuman dan Buku Data Personel.

## Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 29

Panglima adalah Ankum tertinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, secara struktural tidak mempunyai Ankum Atasan.

## Pasal 30

Cukup jelas

## Pasal 31

Penyerahan berkas perkara beserta semua surat yang berhubungan dari Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer kepada Ankum dilaksanakan.

## Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perkara-perkara lainnya antara lain perkara perdata, tata usaha dan perbendaharaan negara.

Ayat (4)...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 33

Yang dimaksud dengan dianggap sebagai dinas dalam Pasal ini adalah bahwa pelaksanaan hukuman disiplin tidak mengurangi hak dan kewajiban serta masa pengabdianya sebagai prajurit.

#### Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelanggaran hukum disiplin prajurit yang berat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan keonaran dan/atau mengganggu tata tertib di lingkungan tempat perbuatan dilakukan.

Penahanan yang dilakukan oleh perwira tersebut dimaksudkan untuk mencegah dan/atau menghentikan sementara keonaran dan gangguan ketertiban.

Dalam hal tidak terdapat Perwira, penahanan dapat dilakukan oleh setiap atasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan berulang-ulang pada ayat ini adalah lebih dari 3 (tiga) kali pada pangkat yang sama.

Khusus untuk Perwira Pemberhentian tidak dengan hormat dilaksanakan melalui Dewan Kehormatan Perwira.

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas